

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Indonesia baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Perkembangan perusahaan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, seperti lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, karena setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti memiliki dampak pada masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu berdiri. Oleh karena itu, muncullah konsep *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya di sebut CSR) sebagai bentuk Tanggung- jawab dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, agar masyarakat juga ikut merasakan dampak perkembangan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia.

*Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya di sebut CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung- jawab Sosial Perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, lingkungan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Suhandari M. Putri, Schema CSR, dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

Pemerintah merangkul perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan Tanggung- jawab sosial perusahaan di Indonesia. Secara konstitusi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan tujuan pembentukan negara<sup>2</sup>.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan Tanggung- jawab sosial perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Konsep CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) jika dipahami tidak hanya sebagai kewajiban saja namun apabila CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) diterapkan secara benar dan tepat sasaran, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) mampu meminimalkan dampak kerugian yang akan ditimbulkan oleh lingkungan di masa yang akan datang.

Pada dasarnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu UU yang mewajibkan sebuah perusahaan melaksanakan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa “Tanggung- jawab sosial dan lingkungan adalah

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND., Tanggungjawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.158.

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.” Hal tersebut menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan penerapan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) terhadap lingkungannya.

Selanjutnya mengenai masalah Tanggung- jawab sosial dan lingkungan dijelaskan pada Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung-jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masalah Tanggung- jawab sosial ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung- jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai berikut: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung-jawab Sosial. Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan sebagai berikut: <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan.

<sup>4</sup> Mukti Azheri, Tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka, 2010.hal2

1. Tanggung- jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

*Coorporate Social Responsibility/* CSR di artikan sebagai Tanggung- jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan itu sendiri, untuk menjalankan Tanggung- jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Adapun bentuk Tanggung- jawab sosial ataupun lingkungan perusahaan itu bermacam- macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat social dan berguna untuk masyarakat umum khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah strategi yang di gunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*, artinya organisasi maupun perusahaan memiliki berbagai Tanggung- jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diataranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan dan dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung- jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, social dan lingkungan.<sup>5</sup>

Adapun masalah yang diangkat pada PTPN XI PG.Djatiroto yaitu:

1. Belum adanya perbaikan akses jalan disekitar Pabrik yang biasa digunakan sebagai akses jalan oleh masyarakat umum maupun masyarakat sekitar PG.Djatiroto, maupun masyarakat pengguna jalan yang melintas disekitar jalan PG Gula Djatiroto, akses jalan tersebut juga digunakan untuk angkutan tebu, sehingga hal ini perlu untuk diperbaiki agar akses tersebut bisa dipergunakan kembali semaksimal mungkin<sup>6</sup>.
2. Perlu dipertanyakan realisasi adanya dana pinjaman yang diberikan kepada petani tebu yang berupa kredit petani yang berupa bantuan modal kredit oleh PG.Djatiroto dalam bentuk kemitraan dengan berupa dana bergulir
3. Perlu di pertanyakan realisasi bantuan sosial yang diberikan oleh PG.Djatiroto kepada masyarakat sekitar dan infrastruktur keperluan umum disekitar PG.Djatiroto dalam bentuk bina lingkungan dengan berupa bantuan sosial.

Pabrik gula merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan dengan banyak *stakeholders* terutama masyarakat luas, mulai dari petani tebu,

---

<sup>5</sup> Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M, Corporate Social Responsibility, Jakarta, sinar grafika,2008. Hal 1

<sup>6</sup> Moch.R.Abdul Fatah, 2017, Csr 2 Miliar Dari Pg.Djatiroto Untuk Akses Jalan Dan Pembangunan Tempat Wisata, Jatim Times, Edisi 18 Mei 2017, Lumajang

konsumen gula sampai karyawan pabrik itu sendiri. Sadar ataupun tidak keberadaan pabrik gula selain membantu menyerap tenaga kerja yang mayoritas berasal dari masyarakat sekitar pabrik, keberadaannya juga menimbulkan ketidak seimbangan.

Keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat bisa menyebabkan dampak positif dan negatif, meskipun memiliki kemanfaatan untuk kesejahteraan dan pembangunan. Mengamati sisi negatif industrialisasi tersebut, tidak adil manakala masyarakat harus menanggung beban social, Padahal masyarakat merupakan pihak yang tidak memperoleh kontra prestasi langsung dari industrialisasi, sementara justru mereka yang harus menanggung dampak sosial dan lingkungan.

PTPN XI PG Djatiroto sebagai salah satu pabrik gula tertua di Jawa Timur dan merupakan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PTPN XI PG Djatiroto sangat besar pengaruhnya bagi para masyarakat sekitar, begitu pula sebaliknya masyarakat sekitar juga membutuhkan PTPN XI PG Djatiroto sebagai perusahaan pengelola tebu dari hasil panen petani sekitar pabrik menjadi gula pasir dan sebagai tempat bekerja bagi masyarakat sekitar pabrik. Ada hubungan timbal balik yang terjadi antara PTPN XI PG Djatiroto dengan masyarakat. Perusahaan harus terus menjalin komunikasi dengan masyarakat, agar perusahaan dapat memberikan informasi mengenai perusahaan dan juga masyarakat tersebut juga dapat memberikan informasi mengenai mereka. Hal tersebut diupayakan agar meminimalisir konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan memberikan pemahaman bersama antara kedua belah pihak.

Program CSR sebaiknya perusahaan mengetahui sikap warga setempat terhadap perusahaan dan masalah kemasyarakatan, sosial, politik dan ekonomi masyarakat sekitar. Dimasukkannya konsep Tanggung- jawab sosial perusahaan pada berbagai peraturan perundang-undangan membuat konsep Tanggung- jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, kebijakan mengenai Tanggung- jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat (1-4), pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung-jawab Sosial Perseroan Terbatas. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung-jawab Sosial.

Khusus untuk Tanggung- jawab sosial dan lingkungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/ PKBL yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo NOMOR : PER-09/MBU/07/2015 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan peraturan tersebut berlaku sampai saat ini. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya

ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan

Dari permasalahan di atas, Pabrik Gula Djatiroto dituntut untuk lebih memperhatikan dampak dari aktivitas-aktivitas perusahaan terhadap lingkungannya, dan penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa dalam penerapan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Tanggung-jawab Sosial/(CSR) PG. Djatiroto Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tanggung- jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung-jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara



Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara ?

3. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Tanggung- jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pelaksanaan Tanggung- jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU//07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara
2. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung- jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara
3. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Tanggung- jawab sosial/(CSR) PG.Djatiroto berdasarkan

pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pelaksanaan *corporate social responsibility/CSR* di PG Djatiroto Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility/CSR* di PG Djatiroto Lumajang berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan berguna bagi semua pihak antara lain:

### **1. Bagi perusahaan**

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen perusahaan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

### **2. Bagi penulis**

Dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapatkan semasa perkuliahan dengan praktek sesungguhnya dalam perusahaan.

### **3. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literatur perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Malang.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pelaksanaan Tanggung-jawab sosial perusahaan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan, mengenai pelaksanaan CSR yang

dilakukan oleh PG Djatiroto Lumajang yang kemudian dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>.

Penelitian dilakukan dengan mengedepankan pembahasan secara yuridis, sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menganalisis akan gejala hukum yang timbul, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian lokasi peneliti yang dipilih adalah PTPN XI PG Djatiroto yang beralamat di Jl. Ranu Pakis No. 1 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, karena dampak keberadaan PG.Djatiroto begitu besar bagi pemerintah dan masyarakat.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama artinya populasi dan sampel penelitian langsung memberikan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto.1998. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali pers Jakarta, hal. 33

data tentang keadaan dirinya<sup>8</sup>. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak PG Djatiroto, terkait dengan pelaksanaan CSR ditinjau dari peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Tanggung- jawab sosial lingkungan Perseroan terbatas dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bermanfaat bagi pembahasan hasil penelitian yang terkait dengan hasil yang diteliti yaitu berupa studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya tentang gambaran umum kabupaten Lumajang, gambaran umum PG Djatiroto Lumajang, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>9</sup> Seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, jurnal, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode

---

<sup>8</sup>Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-dimensi riset ilmiah*, Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hal 119

<sup>9</sup>Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. cetakan keenam. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. hal 87

pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat di pertanggungjawab kan kebenarannya, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai pihak Manajemen perusahaan PG Djatiroto yaitu dengan Bapak M Badrus Samsih devisi PKBL, Bapak M. Zainuri selaku devisi PKBL, dan dengan Bapak Yudho Rahadityo Utomo, S.H, M.H sebagai Lawyer Perusahaan PG Djatiroto dan *Stake Holders* yaitu masyarakat yaitu dengan Rudi Hartono, petani yaitu dengan Muchlis Zain, Bahtiar Efendy, dan perangkat desa yaitu dengan Bapak Arifin yang ada di sekitar perusahaan PG Djatiroto Lumajang, untuk mengambil data tentang pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PG Djatiroto Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo NOMOR : PER-09/MB/07/2015 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

b. Observasi

Obyek observasi yang dilakukan peneliti adalah di PG Djatiroto Lumajang. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati kinerja perusahaan terkait dengan pelaksanaan CSR.

c. Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan

diperoleh data yang benar-benar dapat di pertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang dimaksud adalah data tentang pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PG Djatiroto Lumajang.

d. Studi Internet

Studi internet yaitu cara pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang berhubungan dengan penelitian melalui internet untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

e. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian bahan- bahan kepustakaan dari berbagai literature/ buku- buku, undang- undang, maupun jurnal, beserta dokumen buku dari PTPN XI.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang relevan sehingga memperoleh data yang akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang pelaksanaan CSR oleh PG Djatiroto Lumajang, kemudian faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan CSR tersebut serta bagaimanakah upaya yang dilakukan PG Djatiroto dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Penulisan terdiri dari 4 Bab, secara singkatnya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai kajian pustaka sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Tanggung-jawab sosial perusahaan, meliputi: pertama, mengenai tinjauan Tentang Perseroan Terbatas, di dalamnya memuat tentang pengertian Tentang Perseroan Terbatas, klasifikasi Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan Perseroan terbatas, laporan yang harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Kedua, Tinjauan tentang Tanggung-jawab Sosial Perusahaan/CSR, di dalamnya memuat tentang pengertian, komponen, manfaat, ruang lingkup, Pelaksanaan Tanggung-jawab Sosial/CSR di BUMN, bentuk Tanggung-jawab sosial/CSR.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.



